

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggara Surya Alam, *Yogyakarta Sister City*. Yogyakarta: Indie Book Corner, 2014.
- A.W. Wiyaya, Titik berat otonomi pada daerah tingkat II. Edisi Kesatu, Cetakan Ketiga jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 1999.
- Burchill Scott dan Linklater Andrew, *Theories of International Relation*, Penerjemah: M. Sobirin, *Teori-Teori Hubungan Internasional*, Cetakan Kelima, Bandung: Nusa Media, 2015.
- Huda Ni'matul, *DESENTRALISASI ASIMETRIS DALAM NKRI, Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*, Cetakan pertama (Bandung: Nusa Media 2014).
- Jatmika Sidik, *Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 2001.
- Hermawan P. Yulius, *ed., al., Transformasi Dalam Studi Hubungan Internasional, Aktor, Isu dan Metodologi*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Jackson Robert dan Sorensen George, *Introduction to International Relations*, Penerjemah: Dadan Suryanipura, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 2012. *Panduan Umum: Tata cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah Revisi tahun 2006*.
- Kairupa David, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, Cetakan Pertama Jakarta: Kencana Media Group, 2013.
- Mas'ood Mohtar, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Cetakan Pertama, Jakarta: LP3ES, 1990.

- Mukti Ali Takdir, *Paradiplomacy, Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: The Phinisi Press, 2013
- Musa'ad Abud Mohammad, *Penguatan Otonomi Daerah Dibalik Bayang-Bayang Disintegrasi*, Jayapura: Pusat Kajian Demokrasi Uncen, 2005.
- Rajagukguk Erman, *Hukum Investasi Di Indonesia: Anatomi Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Cetakan Pertama (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia 2007).
- Rachmawati Iva, *Diplomasi Publik, Meretas Jalan Bagi Harmoni Dalam Hubungan Antarnegara*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Calpulis, 2016.
- Romli Lili, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Sefriani, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Cetakan Pertama, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Simanjutak Antonius Bungaran, *Otonomi Daerah, Etnasionalisme, dan Masa Depan Indonesia: Beberapa Persen Lagi Tanah Air Nusantara Milik Rakyat*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2012.
- Shoelhi Mohammad, *Diplomasi, Praktik Komunikasi Internasional*, Cetak Pertama, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011.
- Widjaja. HAW, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2005
- Widodo, *Hukum Kekebalan Diplomatik Era Globalisasi*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2009.

Jurnal dan Tesis.

- Bashar Alireksa Akbarizal, “Kewenangan Pemerintah Kota Bandung dalam Menjalankan Kerjasama Sister City Dengan Kota Braunschweig (2000-2012)”, *Tesis*, UNIKOM, 2014.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014, *Politik Lokal Terhadap Efektifitas Pemerintahan Daerah*. Kedeputian Politik, Hukum, Pertahanan, Dan Keamanan Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Desentralisasi atau Resentralisasi ? Tinjauan Kritis Terhadap UU NO 23/2014. Proceeding Seminar Nasional.
- Damayanti Christy, Potensi Paradiplomasi Dalam Mendukung Kinerja Paradiplomasi Indonesia Menuju Komunitas Asean, *jurnal Unisiri*.
- Dwi Wahyu Handayani. *KAJIAN INTERMESTIK: Ruang Kerjasama Daerah Tanpa Batas*.
- Fazra Dara Khoero, “Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penataan Kerjasama Internasional Study Kasus: Proses Kerjasama Sister City Kabupaten Bogor Dengan Nanning (RRT) pada tahun 2008-2015”, *Tesis*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015.
- Inventarisasi dan Evaluasi Naskah kerja sama Pemerintah Provinsi DIY dengan Pihak Luar Negeri*, Program kerja sama Pemerintah Provinsi DIY dengan Ismalia, Mesir, Bahan Acara Nomor 12, 13, 14, dan 15 Tahun 2004.
- Kurniawati Estu Dyah, “Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah Di Era Otonomi Daerah”, *Jurnal Humanity*, Vol. 5. No. 2, 2010.
- Kambo A. Gustiana. *Etnisitas dalam Otonomi Daerah*. Jurnal Politik, Universitas Hasanudin.

- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DIY Tahun 2011, Bahan Acara Nomor 10 Tahun 2012, DPRD Provinsi DIY, hal VI-3.*
- Novianti, “Kedudukan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Kerjasama Internasional: Studi Terhadap Perjanjian Kerjasama Dodek-Malino”, *Jurnal*, Vol.3, No.2, 2012.
- Politik Lokal Terhadap Efektifitas Pemerintahan Daerah. Kedeputian Politik, Hukum, Pertahanan, Dan Keamanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2014*
- Sandi Andi dan Agustinus, *Potensi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui kerja sama Sister Province*, Laporan Penelitian, Lembaga Penelitian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2001.
- Sinaga, “Implementasi Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah dalam Konteks Otonomi Daerah dan Hubungannya dengan Kebijakan One Door Polcy Departemen Luar Negeri Republik Indonesia”, *Jurnal Administrature*, Vol. 3, No. 3, 2010.
- Suryadi. *Otonomi Khusus DI Papua dan Aceh sebagai perwujudan imlementasi peranan hukum dalam kesajheraan masyarakat*. Pusat penelitian dan pengembangan hukum, Badan Penelitian Dan Pengemban Hukun Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal, Media Pembinaan Hukum Nasional*.
- Sinambela Ismawira Stivani , “Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Kerjasama Internasional (Studi Kasus: Kerjasama Sister City Pemerintah Kota Medan dengan Penang)”, *Tesis*, Paascasarjana UMY, 2014.
- Thontowi Jawahir, “Kewenangan Daerah Dalam Melaksanakan Hubungan Luar Negeri”, *Jurnal Hukum*, Nomor. 2, Volume.16, April 2009.

Zenita Sandra Rizqii. *Praktek Paradiplomacy Pemda DIY Dalam Exploitasi Air Sungai Bawah Tanah Di Gua Bribin Di Kabupaten Gunungkidul 2004-2015. Tesis, Pascasarjana UMY*

Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Kesitimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pedoman perjalanan dinas luar negeri bagi aparatur sipil negara kementerian luar negeri dan pemerintah daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah,